



**BUKATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN PURBALINGGA

NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka perlu mengatur Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan dalam Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
12. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
13. Kategori Pembatasan Akses terhadap arsip adalah kewenangan pengguna arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
14. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
15. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta ketersediaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
16. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
17. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
18. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
19. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
20. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka informasi.
21. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna yang berhak.
22. Penentu Kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas, tanggungjawab dan kewenangan kedinasan keluar dan ke dalam instansi seperti pimpinan tertinggi Eselon II atau Eselon III instansi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

10 42

23. Pelaksana Kebijakan adalah Pejabat pada unit kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas organisasi setingkat Eselon III dan IV seperti Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang/Sub Bagian/Kepala Seksi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
24. Pengawas adalah Pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan seperti Inspektur/Auditor pada Inspektorat, pengawas Intern pada Satuan Pengawas Intern pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
25. Aparat Penegak Hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
26. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
27. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
28. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memotivasi Perangkat Daerah agar memberkaakan arsip dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsipnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, autentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. sebagai acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. tersedianya informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
 - d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikawalikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas dan pengorganisasian;
- b. pengamanan arsip dinamis;
- c. pembiayaan.

BAB IV
AZAS DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 4

- (1) Azas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan menerapkan azas gabungan yaitu azas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan azas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan standar operasional prosedur, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 5

Pengorganisasian Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diklasifikasikan menjadi informasi biasa/terbuka, terbatas dan rahasia
- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknik pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. pengguna internal hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; dan
- e. pengguna eksternal hanya dapat mengakses informasi Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB V
PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu
Sarana

Pasal 6

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing kabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggunakan sarana perangkat lunak (*software*) sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggungjawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaannya.
- (3) pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses

Pasal 8

Arsip dinamis yang tercipta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang termasuk dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. merupakan arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Daerah, antara lain:

- a. arsip dinamis pada Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. arsip dinamis pada lingkungan Inspektorat;
- c. arsip dinamis pada lingkungan Eadan dan Dinas;
- d. arsip dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
- e. arsip dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

/s/

Pasal 9

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawain seperti personal file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 10

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang termasuk dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Daerah meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan personal file;
- b. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/telepon;
- c. arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- e. arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. arsip yang dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- g. arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
- h. arsip yang terkait dengan *memorandum of understanding*; dan
- i. daftar arsip rahasia.

Pasal 11

Pengamanan informasi arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.

Pasal 12

Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1/68

Pasal 13

Tabel klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
UMUM						
	001	Panjang, meliputi : a. Garuda b. Bendera kebangsaan c. Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) d. Banteng/umbul-umbu	Biasa/Tertuka	Pengguna dari eksternal dan interna yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagia Humas dan Protokol
	002	Tanpa kehormatan/penghargaan diberikan kepada non PNS				
	003	Hari Raya/besar, meliputi : a. Nasional (17 Agustus, Hari pahlawan, dsb) b. Keagamaan c. Har ulang tahun				
	004	Laporan, meliputi: a. Terima kasih b. Selamat c. Mohon cari d. Bela sungkawa, dan lainnya				
	005	Undangan (laporan kegiatan pembuatan undangan beserta distribusinya)				
	006	Terdah jabatan (Pamong praja dan pejabat lainnya)				
	010	Urusan dalam, meliputi : a. Gedung kantor termasuk instalasi (listrik, telepon, okorasi/internet, air minum, hiban, alarm, drainage				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	EASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	010 2	3 b. Rumah dinas, penginapan (mess/wisma/hotel) rumah dinas. c. Perhiasan, sarana prasana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, led, laptop dll d. Peralatan kendaraan dinas e. Keamanan/kekeruhan kantor f. Perjanjian kerjasama MOU Pernda dengan instansi pemerintah, swasta g. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Kemerdekaan dan hari-hari besar Keagamaan h. Keberhasilan kantor i. Protokol upacara daerah, tata tempat, penresangan upacara negara/daerah, audiensi, penerimaan tamu j. Kejasama	4 Biasa/Terbuka	5 Pengguna dan sistem/dan internal yang mempunyai hak akses.	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	7 1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Sub Bag Protokol pada Bagian Humas dan Protokol
	020	Barang dan Jasa, meliputi : a. Penawaran (barang, jasa) b. Penawaran barang (bergerak, tidak bergerak) c. Pengadaan, termasuk pengumuman pengalihan, prakualifikasi, evaluasi, pemilihan elang d. SPK, kontrak/amandemen/lelang, teguran e. Surat Perintah Mulai Kerja f. Serah terima pekerjaan g. Pemeriksaan pekerjaan h. Penerimaan waktu i. Dembu j. Sanggahan k. Penyerahan barang/jasa l. Inventaris terasak pendataan, pemeliharaan, penghapusan barang milik negara				1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Layanan Pengadaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENUGSAI
1	020	020 n. UJIP Barang dan Jasa	4 Tebatas	3 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas sekuritas Taggaa penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Layanan Pengadaan
	020	n. Usulan lelang pengadaan barang pakai habis beserta distribusi dan pelaporannya	Dibatasi Terbuka	Pengguna dan eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Layanan Pengadaan
	030	Kekayaan Daerah, meliputi: a. Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak) b. Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen, bangunan bersejarah, dll) c. Barang persediaan dalam gudang d. Alat pengangkutan (damu, udara) e. Perabotan pribadi, Laboratorium f. Perbaikan kesehatan/medis (rumah sakit, busu pengubatan) g. Usulan penambahan aset Daerah, barang bergerak maupun tidak bergerak h. Permintaan perbaikan, perawatan barang inventaris beserta pelaporannya i. Penghapusan aset-aset barang milik Daerah j. Usulan sehubungan barang/jasa pendukung operasional kegiatan rumah tangga Dinas, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda beserta Rumah	Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas sekuritas Taggaa penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKPI/PA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTINDANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	030	Tanggung jawabnya a. Pemeliharaan sarana/persediaan, gedung kartor/ barang inventaris, aset bergerak maupun tidak bergerak b. Tata cara, prosedur pengamanan dan ketentuan asset-asset barang milik Daerah	Terbatas	Pengguna dari eksternal dan internal yang memiliki hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Utama/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Akutansi dan Aset pada BAKUDA
	040	Kebijakan pemerintah pada bidang Kearsipan dan Perpustakaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	Terbatas	Diberes hanya untuk menerima keputusan dan pengawas secara Tanggung jawab hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan dan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	040	Akuisisi, pengontrolan dan penyimpanan bahan perustakaan - Pedaftaran bahan perustakaan - Pengolahan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam - Penyusunan Bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder - Transkripsi, translusi - Survey kondisi bahan perustakaan - Perawatan, pemeliharaan, pengawetan bahan perustakaan dan eHerdia bahan perustakaan	Bebas/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang memiliki hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMPILAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	040 2	3 Pengembangan bahan perpustakaan Pembinaan perpustakaan Pembengat dan kerjasama perpustakaan Pembudayaan gemar membaca Penerapan, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perpustakaan Bimbingan Teknis perpustakaan dan kapuskawanan Pencipta Angka Kredit Fustakawan Parasayurkata bidang perpustakaan Pembinaan dan pengembangan Kearsipan Bimbingan Teknis Kearsipan Pantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perusahaan, Ormas/Ornel dan masyarakat Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria arsip Pengenangan kelembagaan, Sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem kearsipan Penyusunan kajian bidang kearsipan, pengembangan laboratorium sistem kearsipan Audit kearsipan, evaluasi dan Penilaian hasil penguasaan kearsipan	4 Biasa/ Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kriteria Peringkat Daerah	7 Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	040		Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kriteria Peringkat Daerah	Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	040		Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kriteria Peringkat Daerah	Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI CHAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOM
1	2	3	4	5	6	7
		dan perlindungan arsip Arah Media dan Reproduksi arsip statis Pengujian kualitas media arsip dan sarana kearsipan Kestansi dan registrasi arsip A. Memeriksa arsip statis				
010		Penelusuran sumber dan wisata arsip Penyajian informasi arsip dan penerbitan naskah sumber arsip Penyusunan tayangan naskah sumber arsip Pengolahan sirupul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Penghimpunan dan penyajian data dan informasi kearsipan Penerbitan publikasi dan penerbitan kearsipan	Bisa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
020		Laporan kegiatan operasional Perawatan Arsip dan pengamanannya reset-aset arsip	Tertutup	Dibatasi hanya untuk pemenuhan kebutuhan, pengawasan, pembinaan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
040		SANDI 1. Pergantian Persediaan dan Informasi 2. Tata selubung persediaan 3. Pemeliharaan, pemeliharaan kesadaran pengamanan informasi 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persediaan 5. Pengelompokan security operation center	Tertutup	Dibatasi hanya untuk pemenuhan kebijakan dan pengawasan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Sarafi, Statistik dan Telekomunikasi pada Dikominfo 2. Bagian Ortu Lu Seida Kab. Paltalinggo
050		EPPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Monevbang, Monevbang RPKM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Kencana (Rencana Strategi)	Bisa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Program Pembangunan dan penelitian Pengembangan pada BAPPEDABANGDA;

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSEP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
050	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra Bepelkembangan Program Nasional RKP (Rencana Kerja Pemb.) RK4-K (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Pemb. Daerah) Rencana Kerja Perangkat Daerah KUA (Keputusan Umum Anggaran) KUPM (Keputusan Umum Perub. Anggaran) dan PPAS (Pencetakan Plafon Anggaran Sementara) Jawaban Gub, Atas Pandangan Fraksi Nota Keuangan RKF (Rencana Kerja Tahunan) RKG (Rencana Kerja Operasional) Laporan Laporan berkala Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	2. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah	
060	ORGANISASISUKETATAPELAKSANAAN Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai Organisasi Non Pemerintah Organisasi Internasional Organisasi semi pemerintah Corbaga Non Struktural Seke Jabatan Analisis Jabatan Pergakuran/Penilaian beban kerja Jabatan - Struktural dan Fungsional Timan Jabatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian ORTALA	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIL PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Standar Kompetensi Teknis Standar Kompetensi Manajerial				
060		Ketatakelolaan Tata Maska Dinas Stempel dinas dan stempel jabatan. Nama instansi pemerintahan pemerintah, Akademi-selamat kantor dan pejabat, Ketentuan jabatan dinas dan atribut Pola Hubungan Kerja, Sundry Rumah Tangga Operasional Prosedur Hari dan Jam Kerja Pegawai Indeks Kepuasan Masyarakat Standar Pelayanan Layanan Pelayanan Standar/Pasara Kerja Pegawai	Bisa/Tertuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah. 2. Bagian ORTALA
060		Aktabilitas Kinerja Zona integrasi Rakomasi Birokrasi Budaya Kerja	Bisa/Tertuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian ORTALA
070		Penelitian dan Pengembangan Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design perbandingan sampai laporan riset	Bisa/Tertuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Program Pengembangan dan Pembinaan BAPPELITBANGDA 2. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	070	3 Pengembangan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) SIMAS (Sistem Informasi Nasional)	4 Bisa/Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan pada BAPPETIBANGDA 2. Bidang Informatika pada Dinas Kominfo
	070	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster Kab/Kota Desa Incubator Teknologi dan Bisnis	Bisa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Program Pengembangan dan Penelitian Pengembangan pada EAPPELLIBANGDA 2. Bidang Informatika pada Dinas Kominfo
	070	Pameran Produk inovasi Ristik BTC (Bisnis Teknologi Center) Rapak (Penerapan Iptek) IKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual) Kajian Kajian Strategis Diskusi/TGD Seminar, Workshop	Bisa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan pada BAPPETIBANGDA 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	070	Kerjasama Penelitian Rapat Koordinasi/Kopat Teknis Lukakarya Diseminasi/Sosialisasi hasil penelitian Kerjasama Penelitian Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah Perguruan Tinggi/Swasta Lembaga Swasta Nasional, LSM Lembaga Internasional Perckayasaan	Bisa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Program Pengembangan dan Penelitian Pengembangan pada BAPPETIBANGDA 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERUMBUHAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Jadwalkan (Jadwalkan Penelitian dan Penzembangunan), Publisasi ilmiah Jurnal Ilmiah				
090		Konferensi pers/rapat koordinasi termasuk Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Perangkat Daerah, instansi lainnya (dalam dan luar negeri) Himpunan materi samudra pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekda Studi banding, Kunjungan kerja	Biasa /Terbuka	Pengguna dan eksternal dan internal yang menpunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris /Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah, 2. Bagian Humas dan Protokol
040		Bahan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekda	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan pencegah hukurn	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris /Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah, 2. Bagian Humas dan Protokol
		Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. kebijakan. Pelaksanaan dan Evaluasi dalam Pelayanan dan pembangunan dengan lembaga masyarakat, promosi dan informasi serta kunjungan TMM	Biasa /Terbuka	Pengguna dan eksternal dan internal yang menpunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang pemerintahan dan Kerja pada BAPPETUBANGDA 2. Bagian Pemerintahan
090		Perjalanan dinas (SPT/ST/SPPD) meliputi : a. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga Non Kementerian, Tamu asing (ke daerah, Ekson I) b. Bupati, Wakil Bupati c. Laporan perjalanan pegawai SPPD ke Pusat, Daerah dan Luar Daerah d. Laporan hasil kegiatan pelaporan Kurker RI, Wagub, Menteri, dan pejabat pusat ke daerah	Biasa /Terbuka	Pengguna dan eksternal dan internal yang menpunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bagian Humas dan Protokol

NO	KODE ELASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	050	e. Laporan hasil peliputan kegiatan Survei Bupati, Wakil Bupati, Sekda. f. Laporan Perencanaan kegiatan Kumbek: Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Pusat ke daerah	Rahasia	Dibayar hanya untuk pihak Panitia penyusunan protokol Rumah Tangga, penentu kebijakan, pengawas, pengasas hukum	Sangat memiliki dampak mengganggu kinerja Daerah bila teryyak berpotensi mengganggu keamanan kunjungan	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bagian Humas dan Protocol
		g. Laporan perencanaan kegiatan kumker Bupati, Wakil Bupati, Sekda ke Kabupaten	Terbatas	Dibayar hanya untuk pihak panitia penyusunan, protokol penentu kebijakan, pengawas, pengasas hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bagian Humas dan Protocol
II. KEPEGAWAIAN						
	800	Kebijakan Kepegawaian, meliputi: a. Perencanaan b. Penelitian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bidang data dan pengasaan kepegawaian pada HKPPD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Statistik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang data dan pengolahan kepegawaian pada BKPPD
810		Pengadaan Pegawai, meliputi: a. Pendaftaran CPNS (Testing, Screening, Pengumuman dan pemanggilan, Pengujian kesehatan, Penempatan CPNS golongan I-III) b. Pendaftaran tenaga kontrak kerja/MITRA KERJA	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris, Bagian Umum, Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bidang data dan pengolahan kepegawaian pada BKPPD
820		Mutasi, meliputi: a. Pengangkatan CPNS b. Penugasan PNS golongan I- II	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kepegawaian dan Jabatan pada BKPPD
820		c. Pengangkatan dan pembatasan dalam jabatan struktural eselon I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kepegawaian dan Jabatan pada BKPPD
820		d. Pengangkatan dan pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kepegawaian dan Jabatan pada BKPPD
820		e. Kenaikan gaji berkala golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kepegawaian dan Jabatan pada BKPPD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	820 2	3 f. Kennisen pangkat golongan I-IV g. Penulahan/pelempahan/pembantuan golongan I-IV h. Lulus butuh i. Demoting dan penempatan kembali j. Waib militer	4 Biasa/Tertuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Bidang Kepegawaian dan Jabatan pada BKPPD
	830	Kendaraan, meliputi: a. Peninjauan masa kerja b. Persetujuan pangkat/gaji golongan I-IV c. Pengurangan ijsah (pencantuman gelar)	Biasa/Tertuka	Pegawai dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kepegawaian dan Jabatan pada BKPPD
	840	Kesejahteraan Pegawai, meliputi: a. Jurnalan (struktural/fungsional) b. Kehormatan c. Tambahan penghasilan d. Ijasen, Ases, RPS, bantuan pendidikan, pemahai e. Surat di-quesai	Biasa/Tertuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kepegawaian dan Jabatan pada BKPPD
	850	Cuti, meliputi: a. Tahunan	Biasa/Tertuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pembinaan dan P.matuusahaan Kepegawaian pada BKPPD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS AKTIF	KLASIFIKASI KEAMANAN	EAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Bess c. Sekut d. Bersalin e. Alasan penting f. Di luar tangungan negara		internal yang mempunyai akses	kinerja Perangkat Daerah	masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Penawarabahan Kepegawaian pada BKPPD
860		Penilaian, meliputi : c. Penghargaan (saya/encana karya setya, kenalkan perangkat anumerita, hadiah kenilaian pangkat, pegawai teladan)	Biasa/terbuka	Pengguna dan eksternal dan internal yang mempunyai akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Penawarabahan Kepegawaian pada BKPPD
360		a. Hukuman (denda, sedang, berat)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk peneru kebijakan, pengawasan ketahanan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Penawarabahan Kepegawaian pada BKPPD
860		c. Komite/DP3	Rahasia	Dilatas hanya untuk peneru kebijakan, pengawasan ketahanan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Penawarabahan Kepegawaian pada BKPPD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIF	KLASIFIKASI KEAMANAN	FAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENJUALAH
1	860	3 d. Ujian dinas tingkat I dan III	4 Biasa/Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	5 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Bidang Pengembangan dan Diklat pada BKPPD
	860	c. Pekerjaan kinerja (struktural dan fungsional)	Rehasa	Dibatasi hanya untuk pemenuhan kebijakan, pengawasan dan pembinaan dan petagak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terakut data pribadi	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pengembangan dan Diklat pada BKPPD
	860	f. Rehabilitasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan dan Diklat pada BKPPD
	870	Tata Usaha Kepegawaian, meliputi: a. Formasi pegawai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Penatausahaan kepegawaian pada BKPPD
	870	b. Bezzetting/daftar urut kepegawaian c. DUS Non PNS tidak tetap/BLUT	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Penatausahaan kepegawaian pada BKPPD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DAFTAR PENTIBANGAN	UNIT PENGOLOH
1	870	3 d. Sistem informasi kepegawaian (NIP, KARPPK, tanda pengenalan, daftar keluarga, KARSU/KARIS, daftar riwayat pekerjaan)	4 Biasa/Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Penatausahaan kepegawaian pada BKPPD
	870	e. Kewenangan administrasi kewenangan (pelimpahan wewenang, specimen terdoh tangan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Penatausahaan kepegawaian pada BKPPD
	870	c. KORPRI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Penatausahaan kepegawaian pada BKPPD
	880	Pemberitahuan, meliputi: a. Permintaan sendiri termasuk pengunduhan tir dengan lak penarikan golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Penatausahaan kepegawaian pada BKPPD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEFAYAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	5	4	5	6	7
880	b. Perasiin (ancas/duda, yatin jitu)	Biasa/Tertuka	Pengguna dan eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Perencanaan dan Penatausahaan kepegawaian pada BKPPD	
886	c. Karena menir egel	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekreariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Perencanaan dan Penatausahaan kepegawaian pada BKPPD	
880	d. Alasan lain, keuzuren jasmari	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Perencanaan dan Penatausahaan kepegawaian pada BKPPD	
880	e. Tidak dengan hormat	Rehasia	Dibatasi hanya untuk pedetu kebijakan, pengawas kebijakan dan percek lakukan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah terkait data pribadi	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Perencanaan dan Penatausahaan kepegawaian pada BKPPD	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	ASAS PERTUMBUHAN	UNITS PENGOLAH
1	880	f. Pembekalan pas yang akan purna dan tak usih 3	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	c	7 1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangka Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Penelausahan kepegawaian pada UKPPD
	880	a. Pemberitahuan pegawai Non PNS tidak tetap/ELUD	Biasa/Terkunci	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangka Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangka Daerah 2. Bidang Pembinaan dan Peratusaan kepegawaian pada BKPPD
	890	Pendidikan Pegawai (Toto Usaha): a. Perencanaan program penelitian b. Sarana Pendidikan c. Jenis dlat dan Pelaporan dlat d. Pengembangan kompetensi pegawai e. Tugas belajar (jika belajar, tunjangan, bantuan pendidikan, perumahan keluarga) f. Tenaga pengajar/narasumber g. Jurnal Ilmiah h. Penelitian i. Magang j. Short course/ in house training k. Koneksi pasca dlat dan evaluasi narasumber	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangka Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangka Daerah 2. Bidang Pengembangan dan Dlat pada BKPPD
	890	Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu: a. Sertifikasi Kompetensi b. Pengembangan Perangka Pembelajaran dan Tenaga Pengajar	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangka Daerah	Bidang Pengembangan dan Dlat pada BKPPD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Pengendalian Mutu Diklat c. Kerjasama Penyelenggaraan Diklat e. Karya Tulis/ Lokakarya f. Kurikulum, Silabi, dan Modul g. Metode Pembelajaran (kunjungan, Ceramah, Simposium, diskusi kuliah lapangan, kurikulum, karya tulis)		hak akses		
	890	Pengembangan Kompetensi Teknis : a. Pengembangan Kompetensi / Diklat Teknis Utama b. Pengembangan Kompetensi, Teknis Inti c. Pengembangan Kompetensi/ Teknis Pilihan d. Praktek Lapangan/ Observasi Lapangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan dan Diklat pada BKPPD
	890	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional : a. Pengembangan Kompetensi / Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b. Pengembangan Kompetensi / Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional c. Pengembangan Kompetensi Diklat Teknis Jabatan Fungsional d. Praktek Lapangan/ Observasi Lapangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan dan Diklat pada BKPPD
	890	Pengembangan Kompetensi Manajerial : a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Daerah c. Pendidikan Dasar bagi CPNS d. Visitasi/ Benchmarking e. Inovasi Kepemimpinan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan dan Diklat pada BKPPD
III. KEUANGAN						
	900	Keuangan meliputi a. Nota Keuangan b. APBD c. APBD	Tertatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta pengalokasian	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						pada BAKEUDA
911		Anggaran, meliputi: a. Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan OPD/PPKD, pemimpin, dan pejabat keuangan, pejabat teknis BLUD b. DPA/DPDA/DPAL-OPD/PPKD c. Anggaran kas d. Surat Penyediaan Dana (SPD) Akuntansi yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terbatas	Dibatas hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA
921			Terbatas	Dibatas hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Akuntansi dan Ases pada BAKETDA
931		Pembayaran meliputi surat perintah pencairan dana (SP2D), surat pencetakan perbitan SP2D dan daftar penguji SP2D	Terbatas	Dibatas hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA
941		Penerimaan kebendaharaan yaitu bintelekursus yang berkaitan dengan keuangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA
951		Pengelolaan kas daerah meliputi a. Laporan pemotongan IWP, laporan, pph 21 dari gaji b. Laporan rekognisi atas penerimaan Daerah	Terbatas	Dibatas hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha di masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERUBAHAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> c. Daftar pemotongan dan penyerahan pajak (IEN/ppt) dari CV/PT/irsibang d. Surat tanda setoran (STS) e. Laporan realisasi daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran f. Rekonsiliasi meliputi surat penerimaan, laporan bank g. Laporan mutasi penempatan deposito h. Surat perintah transfer uang 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 2. Bidang Perencanaan pada Bakuada
950						
960		Evaluasi dan Pengendalian meliputi Tuntutan (ganti rugi dan pertanggungjawaban), Evaluasi dan perubahan APBD Kab/Kota serta pertanggungjawaban APBD Kab/Kota, Laporan keuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Perencanaan pada Bakuada
960		Penjualan kendaraan dinas melalui lelang	Biasa/Tertentu	Pengguna dan eksterna, dan interna, yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Perencanaan pada Bakuada
961		Laporan Hasil Pemeriksaan (Inspektorat dan BPK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretrans/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Akuntansi dan Aset pada Bakuada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEMASAN	HAK AKSES	DASAR PERJIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
970		<p>PENDAJARAN Perimbangan Keuangan Eg: Hasil Pajak Pajak Bumi Bangunan (PDB) Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21) Baji Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam/Migas Subsidi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Diproto At, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengembalian & Pemutihan AJ Perumahan, Pajak Reklame</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	2. Bidang Akuntansi dan Ases pada Bakuada 1. Sekretaris/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Pengujian, Penerimaan dan Pelaporan pada Bakuada
970		<p>Retribusi bidang kesehatan, bidang seni budaya dan pariwisata, bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar) Retribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemukiman bewan) Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir dll) Retribusi pengurusan air bawah tanah Retribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk irigasi dan lelang hasil hutan, foras rama dll) Retribusi bidang perikanan dan kelautan Retribusi bidang perumahan Taggaurubangan. Pemanfaatan air permukaan dan metologi Cukai Retribusi bidang lainnya (termasuk sampah)</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Penghasilan, Penerimaan dan Pelaporan pada Bakuada
570			Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Penghasilan, Penerimaan dan Pelaporan pada Bakuada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEMALAHAN	HAK AKSES	DANAR PERTIMBANGAN	UNIL PENGOLAH
1	9/1 2	3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dar. Kendaraan Darat Air Pajak Retribusi Bunga Deposito Bunga Tabungan Pemeliharaan Ganti Rugi Ases Kerugian Adu kehilangan Kelelahan Daerah (TP-1 GR) Sumbangan Pihak Ketiga (Kendaraan (Dealer), Kayu) Penanaman lain-lain Penanaman kembali kredit DIKK Tarack tidak layak bibit Sewa Internet Pemenuhan Dari Dana Revisi/Revolving Kerjasama Dengan BUMIDA Pemenuhan DIKES	4 Diasa/Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah. 2. Bidang Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaporan pada Dakeada
970		Pengolahan data pendapatan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) Pengembang sistem informasi pecepatan Pengeluaran potensi dan pengembangan pendapatan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk pemenuhan kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bidang Perencanaan, Perencanaan dan Pelaporan pada Baseuda

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT LINGGAHAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	PEMERINTAJIAN					
120		PEMERINTAH KABUPATEN Monografi, Tambahan Kode Wilayah	Bebas/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagai Pemerintah
120		Kebijakan Femenial Kabupaten Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati (LKj) Koordinasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Kerjasama Antar Kabupaten/Daerah, dan Luar Negeri Bupati, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dan Sebagainya Wakil Bupati, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan Dan Sebagainya Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan Badan-Badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida Pencalonan Ususan/SPM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Pemerintahan
120						1. Sekretaris/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOLAH
1	2	3	4	5	6	7
120		Pendirahan Ibukota Kabupaten Perubahan dan Penggantian Nama Kabupaten, Daerah, Jalan Penyediaan Urusan				masing Perangkat Daerah 2. Bagian Pemerintahan
120		Pembentukan / Pemekaran	Tertbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Pemerintahan 2. Sekretariat DPRD
120		Pembentukan Daerah Otonom	Tertbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Pemerintahan 2. Sekretariat DPRD
120		Pembentukan Wilayah	Tertbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Pemerintah 2. Sekretariat DPRD
120		Perubahan Batas Wilayah	Tertbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Pemerintahan 2. Sekretariat DPRD
120		Pemekaran Wilayah	Tertbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Pemerintahan 2. Sekretariat DPRD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PER. INBANGAN	JANIT PENGOLAH
1	2	4 Perundangan tingkat provinsi meliputi perda, peraturan gubernur/instansi gubernur Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Peraturan Daerah, Peraturan bupati/Peraturan Wali kota Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa	4 Biasa/Terbuka	5 Pergerakan dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum
80		Perundangan tingkat provinsi meliputi Kepgub Perundangan Tingkat Kab/Kota meliputi: KepDupati/Kep. Wali. Bupati Kopres, Kepres Peradilan Umum, Peradilan Negeri Tingkat Pertama Peradilan Tinggi, Mahkamah Agung	Relasia	Pengguna dan internal yang mempunyai hak akses Dibatasi hanya untuk keperluan kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum
180		Peradilan Tata Usaha Negara	Relasia	Pengguna dan internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Peraturan Hukum dan Ham pada Bagian Hukum
180		Peradilan Agama Islam Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Agama Islam Mahkamah Islam Agung Mahkamah Militer Tingkat Pertama Mahkamah Militer Tinggi Mahkamah Militer Agung Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Tata Usaha Negara Pengadilan Tingkat Pertama Korupsi Peradilan Hak Asasi Manusia	Tertutup			Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASETIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	5	7
		Makamah Konstitusi Komisi Yudisial Ombudsman				
180		Upaya Hukum Bandang Kuesesi Denda Vessel Perinjauan Kembali Grasi, Amnesti, Abolisi Ekskusi Pembinaan Hukum meliputi Keadilan Bantuan Hukum, meliputi LDH Hukum Internasional Imigrasi Visa Paspor Exit Reentry Lintas: Habis/Habis Aritar Negara Kepenjaraan Registrasi Naraodena Pembinaan: Narapidana Pembinaan Narapidana	Terbatas			Kewenangan Pusat
180		Tahanan Cilipi Kejaksaan Penuntutan Umum Penuntutan Khusus Hukum Adat	Terbatas			Kewenangan Pusat
200		POLITIK Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara Kecamatan Bangsa Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk pekerja kehijauan perjawatan serta	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Kesbangpro 2. Bagian Pemerintahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	LIKAS AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGGICLAH
1	2	termasuk Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud bankam Orde Baru Orde Reformasi Partai Politik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL Program Kerja, data kegiatan PARPOL Pembinaan PARPOL Hasil Munas/Musda PARPOL Struktur/Keperguruan, Pengkaderan dan Esanggolan PARPOL Data Inventaris dan Kemangan PARPOL Partai/Organisasi Terlarang Kepunasan perubaran partai/organisasi terlarang Daftar Jai data pengurus anggota partai /organisasi terlarang Tjin Meringgalkan terapat/don.sili baji anggota partai /organisasi terlarang Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai /organisasi terlarang Laporan umum mengenai keadaan anggota partai /organisasi terlarang	4	5 penegali hukum	6	9
210			Tertatas	Dibatasi hanya untuk pemeru kebijakan, pengawasan serta penepak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Keabngpol 2. Hognia Pemerintahan
220		Organisas, Kemasyurakalar Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk pemeru kebijakan pengawasan serta penepak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSEP	KLASIFIKASI KEMAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBRANGAN	UNIT PENEGCLAH
1	220	3 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	4 Tertulis	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Kesbangpol
	221	Verifikasi dan rekomendasi bisnis Ormas	Tertulis	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol
	230	ORGANISASI PROPESI DAN FUNGSIONAL Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Tertulis	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol
	240	ORGANISASI PEMULA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Tertulis	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol
	250	ORGANISASI BUKUH, LAIN DAN MELAYAN Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi	Tertulis	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKAS	JENIS ARESIP	KLASIFIKASI KEAYAMANAN	HAK AKSES	DANAK PERTIMBANGAN	UNIT PENGO LAH
1	2	3	4	5	5	7
	270	Verifikasi dan rekomendasi hibah KPU	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol
	280	PENCAWASAN PEMILU/PELUKADA Pantauan Pelanggaran Sengketa Pawwaslu	Tertasse	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Kesbangpol 2. Nagari Femrinabam
	280	Verifikasi dan rekomendasi hibah Bawaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol
	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Biasa/Tertuka	Penakun dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketertiban Umum dan Keenarman Masyarakat pada Satpol PP
	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Kelijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ ancaman keamanan/ketertiban umum Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Urutibam)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kerubaa Umum dan Ketertiban Masyarakat pada Satpol PP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSD	KLASIFIKASI KEAYATAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMELANGAN	UNIT PENGOLAH
1	300	3 Pengawasan Transmisi Peningkatan Pelaksanaan Perda Pembinaan/Penyuluhan sebagai bagian Perda Patrol Wilayah Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing Pengawasan Pengawasan Pembertahanan keadaan bahaya dan ancaman melalui pemeliharaan, ketertarikan pelaksanaan dan pengawasan	1 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Bidang Keterlibatan Umum dan Keterlibatan Masyarakat pada Sarpol PP
310		PERTALIANAN Darat dan Udara Kastahanan Bangsa Kastahanan Ekonomi Kastahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasvaktakan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Pusat
330		KEAMANAN Kepolisir Polisi Patroli Praja Huru-hara/Demonstrasi Sejata Api/Teraan Balas Pelakas Perjudian Sarat-surat kaleng Pengaduan Masyarakat Himbauan atau Larangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Keterlibatan Umum dan Keterlibatan Masyarakat pada Sarpol PP
330		Bahan Laporan : - Data Eks Neropdema Teroris - Data Jaringan Intelijen - Data Penanganan Konflik/Perpeleasan Konflik Sosial yang masih berjalan - Laporan Rakor Penanganan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Keterlibatan Umum dan Keterlibatan Masyarakat pada Sarpol PP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERUMBUHAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
310	<p>Hasil Pelaksanaan Monitoring Penanganan (Kerugian) Bahaya Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Data Pengurus Anggota Organisasi Terlarang - Daftar Berkala tentang keadaan anggota Organisasi Terlarang <p>Laporan Umum (Korncisi, Jumlah Kekuaran) mengenai Organisasi Terlarang</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang merugikan atau kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol	
330	<p>Bendel Bahasis Intelijen meliputi :</p> <p>Dokumen Bahari Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Daftar - Dokumen Perschranan HTI - Data Organisasi Terlarang/PKI - Data Nap teroris - Data Rakitka Karau - Data lainnya dan Ltelejeju 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol	
340	<p>PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</p> <p>Kebijakan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas</p> <p>Pembinaan dan Diklat</p> <p>Pengangkatan/pembentukan anggota Linmas</p> <p>Pendidikan/latihan Linmas</p> <p>Pelatihan PAM Swakarsa</p> <p>Pendidikan/latihan MENWA</p> <p>Pengrahan dan pengendalian Linmas</p> <p>Kesejahteraan bagi anggota Linmas</p> <p>Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas</p> <p>Pantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas</p> <p>Salurkan uang duka bagi anggota Linmas</p> <p>Penghargaan bagi anggota Linmas</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS AP/3IP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENJUALAH
1	340	3 Data Crimes, MENWA, PAM Swakonsi Linmas lanjut Usia Orientasi Kesadaran Bela Negara Kegiatan Pelaksanaan Timmas	4 Terbatas	3 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Bidang Kebakaran dan Pertindungan Masyarakat pada Smpol PP
	350	KEJAHATAN Makar/Pembunuhan/Terrorisme Perubahan Pengaruh/Pencurian/Perampasan Sabersi/Penyeludupan/Neokotaka Peminuan dan Peraduan Kriminal/penyewengan/penyalahgunaan jabatan Kekerasan pada perempuan dan anak Pelaporan Penanganan korban Konsultasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, dll)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Asisten dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perlindungan Anak pada Dinas/daerah KB P3A

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS RISIKO	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERUMBUHAN	UNIT PENJELAJAH
1	360	3 BENCANA Pelatihan Posko Bencana Sarat Keputusan, Berita Acara, MOU, Koordinasi Gunung Merapi/Kecirpa/Tsumari Banjir/Luluh Longsor/Angin Topan Kebakaran/Kecelakaan	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 BPBD
	370	KECELAKAAN Latihan SAR Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam Pelatihan manajemen bagi pejabat Serkorlak dan Satlak PRP Pelatihan kemampuan Pasdikop bag. aparat PDG Latihan ketrampilan prosedur kebakaran.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD
	370	Kecelakaan Darat, Laut, Udara Investigasi/penyelidikan kecelakaan Asuransi Kecelakaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	RPD
	380	PELINDAMPIAN REHAB.LITASI DAN REKONSTRUKSI Perencanaan Perencanaan teknis Rekomendasi Baruan Bencana Penanggulangan Bencana dengan pihak lain Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi PUSDA,LOPS Kunjungan lapangan Relawan Laporan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perencanaan Sosial dan K-dang Asistensi dan rehabilitasi Sosial pada Dussosialdus KETSA 2. BPHD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
1	390	3 Kerjasama BPBD dengan instansi lain Inventarisasi Pokok-pokok pikiran DPRD Prov. Jawa Tengah dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Percepatan Perubahan Peraturan Daerah Berita Acara Hibah Peralatan BNPS Berita Acara Pengal. Pukui Perawatan	4 Bisa/Terbuka	5 Peguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 BPBD
	390	Rekomendasi Bantuan Peralatan Rapat Koordinasi PBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD
	390	Kegiatan dari instansi luar BPBD terkait Pencegahan dan Kesiapsiagaan Surat Keputusan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Bisa/Terbuka	Peguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD
	400	KFSF/HAHIFERAKAN RAKYAT Kejijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat	Bisa/Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD
	410	PEMBANGUNAN DESA/KEKURAHAN Gorong-gorong Swadaya gotong royong Perbaikan Pungutan Lembaga Sosial Desc (LSD) Latihan kerja masyarakat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Kesra 2. Dirpermasdes 3. Dinsosdaldak KB P3A 1. Bidang Bidang pada Dirpermasdes 2. Bagian Pemerintahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILIAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Perencanaan Kesejahteraan Keluarga (PEKK) Penyelamatan Masyarakat Desa Kelermbagaan Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Perencanaan Desa Pembiayaan Pembangunan Desa Inventarisasi Data</p>				
110		<p>Pertunjuk/Pembinaan/Pekembangan Pelaksanaan Pembangunan Bantuan/Stimulasi Perkreditan Desa Pelaporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Koperasi Desa Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Koperasi Unit Desa (KUD) Swasta dan Prasarana Desa Pemukiman kembali penduduk Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa Perbaikan Kampung Teknologi Tepat Guna (TTG) Pengembangan Desa Pengembangan Desa dan Kelurahan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri, Perguruan Tinggi, Keroncoran/Lemaha Pemerintah, Lembaga lainnya</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasa serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Peringkat Daerah	Bidang Bidang pada Dirpermasdes
420		<p>PENDIDIKAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb</p>	Hissa /Tertuka	Penggunaan dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Bidang pada Dinas Dikbud 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
1	420	3	4	5	6	7
	Ijazah, sertifikat		Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta pemegang akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal dan SD, SMP pada Dinas Dikbud
	Sekolah Pendidikan Luar Biasa		Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal pada Dinas Dikbud
	Persyaratan masuk sekolah, tes, ujian, OSPEK Tahun Pelajaran -hari libur Kegiatan belajar diantaranya reuni, dan wawasan, wawasan, lomba lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains, Pelajar cerdas, pertukaran Pelajar)		Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal dan SD, SMP pada Dinas Dikbud
	Uang Sekolah, danteanya SPP SMP Bek Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi Barisan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BK M), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kunjungan Karya Tulis, Karya Ilmiah Ujian		Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta pemegang akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal dan SD, SMP pada Dinas Dikbud
	Sarana Pendidikan (buku, perlengkapan pendidikan) Bangunan Pendidikan (Laboratorium, Perpustakaan) Gedung Sekolah Kampus Pusat Kegiatan		Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal dan SD, SMP pada Dinas Dikbud

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERLINDUNGAN	UNIT FUNGSI
1	420	3 Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi) Pertukaran Guru ke Luar Negeri Sertifikasi Guru	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Bidang Pembinaan Kelembagaan pada Dinas Dikbud
	42C	Sistem Informasi dan ITK pendidikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal dan SD, SMP serta Dinas Dikbud
	426	KEOLAHRAAGAN Pembinaan Keolahragaan Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejuaraan Olimpiade) Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porcau dll) Olah Raga Rekreasi/Masial (Senam, sepeda santai, olah raga tradisional) Iptek dan Inovasi Olah Raga Sarana Promosi Keolahragaan Kemiripan Olah Raga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 2. Bagian Kelembagaan Racyd
	427	KEPEMUDAAN Pertukaran Pemuda Pasikberak Sarana Program Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja Kemiripan Pemuda Sarung Taruna Kepramukaan/Kepanduan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 2. Bagian Kelembagaan Racyd

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KHAMAKAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNTUK PENCOLAH
1	430	3 KEBUDAYAAN Kejajaran dan Program Pemerintah untuk kebudayaan Pembinaan bidang kebudayaan Kesenian Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)	4 Biasa / Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Dikbud 2. Bidang Kesejahteraan Rakyat
	430	Sarana Gedung Kesenian Padepokan Lertobaga Adat Kegiatan adat/tradisi Usaha perunjakan, liburan, kesenangan : festival, pentas seni Kepurbakalan Museum Peninggalan Kuno Benda Sejarah Danasa Penghayat Kepercayaan	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Dikbud 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	430		Terbatas	Dibatasi hanya untuk peneliti kebijakan pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Dikbud 2. Bidang Kesejahteraan Rakyat
	440	KESEHATAN Kebijakan dan Program Pembangunan kesehatan (Pelayanan Kesehatan, Perencanaan Kesehatan, Kesehatan masyarakat, SDK, Sekretaris) SOP Praktek Klinik Laporan Bulanan (PTRM/HIV AIDS/TB/DOT)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk peneliti kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Kesehatan 2. RSU/Pluakemas

NO	CODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEMAMPUAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNTUK PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
440	<p>Jawa</p> <p>Perawatan</p> <p>Obat-obatan (pernyimanan dan pengawasannya)</p> <p>Pengobatan</p> <p>Obat Terkrang</p> <p>Kelamin, HIV, AIDS, IMS</p> <p>PeLAYANAN Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, vira)</p> <p>IGD; ICU</p> <p>IBB</p> <p>MCU (Medical Check Up)</p> <p>Farmasi</p> <p>Laboratorium Klinik, Patolog, Anatomi, Forensik</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan 2. RSUD/ Puskesmas 3. Bagian Keselamatan Rakyat	
440	<p>Bank Darma Rumah Sakit</p> <p>Sarana Rumah Sakit</p> <p>CSSD/Laundry</p> <p>Kasus Hilang Rumah Sakit</p> <p>Tenaga Medis</p> <p>Perencanaan Tenaga Medis</p> <p>Perijinan untuk Tenaga Medis</p> <p>Standarisasi</p> <p>Pernyimanan</p> <p>Distribusi</p> <p>IPAL (Pengalasan Pengolahan Limbah)</p> <p>Rekam Medis</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan 2. RSUD/ Puskesmas	
			Rata-rata	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	RSUD/ Puskesmas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERHIMPUNGAN	LINI FINGGULAH
1	440 2	3 Gigi Mata Kesehatan Ibu dan Anak JPSBK (Jaminan Penguaman Sosial Bidang Kesehatan) JAMKESMAS JAMKESDA JALPERSAL Jaminan lainnya Pemeriksaan obat Distribusi obat Obat Generik T.B.C Kusta Tranbisia Kholera SARS, dan jenis penyakit lainnya Pembantuan Penyakit Menular Sumber Bangsa P. (P2B) Malaria Dengue Haemorrhagic Fever (DHF), DRD Filaria Serangga	4 Biasa /Tertaka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 2. KSI/Instansias

7

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DAJAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	440	3	4	5	6	7
	Rabies Antrak Leptospirosis Chikungunya Penyakit lainnya Pencegahan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular A. Pektoris TIA (Trauma Mastoidik Akut) Hipertensi Stroke Diabetes Mellitus Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA, Serviks, Mammari, Jepar, Papan dan lainnya 440 Epidemiologi dan Karantina (Epi/ika) Immunisasi Surveilans Pertisida Pencegahan Jamahan Keluarga Kesehatan Infeksi Higien sanitasi Terpet-terpet makanan minuman Sarana dan utilitas Pestisida, insektisida Pencegahan Jabatan keluarga, sanitasi rumah tangga Kesehatan industri, misal Poskestren, sanitasi masjid Higien sanitasi CA, Mammari Higien sanitasi CA, Hepar Higien sanitasi CA, Papan Kejadian Khusus	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan dan Bidang Pengabdian dan Pengabdian Penyakit serta Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 2. RSUD/Puskesmas	1. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan dan Bidang Pengabdian dan Pengabdian Penyakit serta Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 2. RSUD/Puskesmas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KLAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNTAH PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Dekompensasi/ordosis (serangan jantung)</p> <p>Astma</p> <p>Psikosis</p> <p>PPOM</p> <p>Kecelakaan Lalu Lintas</p> <p>Kejadian Luar Biasa (KLB)</p> <p>Gizi dan Pengawasan Makanan</p> <p>Keamanan Makanan</p> <p>Bahaya ke aparatur, busung lapar, gizi busuk</p> <p>Ketahanan makanan</p> <p>Menu makanan rakyat</p> <p>Gondok endemik (GAKI)</p> <p>Keperawatan</p> <p>Komite Medik</p> <p>Rawat Inap</p> <p>Rawat Jalan</p> <p>RSD, RSUD, RS Khusus</p> <p>Studi Banding Rumah Sakit</p> <p>Pennjang Medis</p> <p>Radologi</p> <p>Gizi</p> <p>Muta Rumah Sakit</p> <p>Akreditasi</p> <p>IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)</p> <p>Promosi Layanan Kesehatan</p> <p>Perdayagunaan Tenaga Medis</p> <p>Kegiatan Bakti Sosial Tenaga Medis</p> <p>TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)</p> <p>Diklat Tenaga Kesehatan/Medis</p> <p>Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis</p> <p>Penulisan di Bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis</p> <p>Ferliien Kesehatan</p>				
440					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perungkat Daerah	<p>1. Diklat Pelayanan dan Subbidaya Keselatan dan Bidang</p> <p>Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Higien Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p> <p>2. RSU/Puskesmas</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DAFTAR PERTIMBANGAN	TUJUT PENGUCLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Perjuru bekaluan dengan Alat Kesehatan Pengobatan Alternatif Pijat Akupunktur</p> <p>SPJ (Samar Pengawas internal)</p> <p>ISO</p> <p>PSEH (Problem Solving for Better Hospital)</p> <p>Jamu dan herbal</p> <p>Dukun</p> <p>Lembaga penyedia layanan kesehatan PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling</p> <p>Praktik dan Balai Kesehatan</p> <p>Rumah Bersalin</p> <p>Posyandu</p> <p>Laboratorium Kesehatan</p> <p>Sanatorium Kesehatan</p> <p>Center</p> <p>UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)</p> <p>Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, lab</p> <p>Farmasi dan obat</p> <p>Ambulans dan Pengobatan Penyakit menular langka</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Dibatasi hanya untuk penerbit kebijakan, pengawasan serta penegak hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p> <p>2. RSUD/Puskesmas</p>
	44)	<p>RSU, RSI, RS Khusus</p> <p>PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling</p> <p>Poliklinik dan Balai Kesehatan</p> <p>Rumah Bersalin</p> <p>Posyandu</p> <p>Laboratorium Kesehatan</p> <p>Sanatorium Kesehatan</p> <p>Kanker</p> <p>UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Dibatasi hanya untuk penerbit kebijakan, pengawasan serta penegak hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Kesehatan Masyarakat pada</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSEP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, melalui media PKK, Posyandu, dsb Pemasukan dba: Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Menular Jantung				Dinas Kesehatan 2 RSUD/kesmas
44)		Perlu izin untuk tenaga medis meliputi surat izin praktik dan surat izin kerja	Tertabas	Dibatasi hanya untuk peneru kebijakan, pengawas, serta penagck hukum	Memiliki dampak yang mengancam kinerja Perangkat Daerah	Badang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan
450		AGAMA Kebljakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan				Kewenangan Pusat
45C		Bantuan dibidang keagamaan Islam Peribadatan (Sholat, Zaka, Puasa, Haji/Umrah) Infaq, Sadaqah Rumah ibadah (Masjid, Musholla, Sunat) Tekoh Agama Pendidikan Agama Pendidikan Tinggi Agama Menengah, MTs, MA Dasar, Pra Sekolah, MI Lembaga perdikar Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll) Sumber pendidikan meliputi buku, gung sekolah dll	Biasa / Tertaba	Perogret dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengancam kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Pusat
450		Tenaga Pengajar Dakwah (Pengajian, MTQ) Wakaf Mazhab Agama Islam	Biasa / Tertaba	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak	Tidak memiliki dampak yang mengancam kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS KEJADIAN	KLASIFIKASI KEAMALAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	460	3 Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rulayat dll) Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i) Kadaster Protestan, Katolik (Peribadatan, Rumah Ibadah (Gereja dll) Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll) Mazhab, Organisasi Gejzani) Hindu, Buddha dan Kung Fu Cu Peribadatan Rumah Ibadah (Pura, Candi, Vihara, Kerinci) Tokoh Agama, Rohaniawan Mazhab, Organisasi Agama	4	5 akses	5	?
460	SOSIAL Rehabilitasi Penyandang Cacat Cacat Ganda Cacat Fisik Cacat Mental/ke Psikis Rehabilitasi Sosial Pengemis, Gelandangan/Orang Terlanjar(PTOT) Anak jalanan Tuna Susila Anak Nakal Tuna Wisma Lanjut usia	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Perintah	1. Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial pada Linsosdaduk KB PIA 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat	
460	Korban Tindak Kekerasan dan Paksaan Migran	Rahasia	Dibatasi hanya untuk rencan, kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan pemerintahan.	Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial pada Dinsosdaduk KB PIA	
460	Keprihatinan dan Kepedulian Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan janda/pula.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	I. Bidang Pelayanan Sos. al. pada	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNTUT PENGOLOM
1	2	3	4	5	6	7
		Perinis Kemandekaan meliputi Pembinaan, pengkargaan dan turangan kepada Perinis Kemandekaan, Veteran Cacat Veteran Kesejahteraan Sosial		penawasan serta penagak hukum		Diususdaldak KB P3A 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
450		Jaminan Makaan Publikwen (TMP) Penyelenggaraan Uudiao	Terbaras	Ditatas, banyu untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penagak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinasocalcuk KB P3A 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
460		Organisasi dan Kekmbangan Masyarakat Sosial : Karang taruna Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Organisasi Sosial (Orsos) Dunia Usaha	Bisa/Tertutup	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinasdaldak KB P3A 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
460		Kurban kekacauan, pengungsian, rehabilitas Taruna Siega Beruana (TAGANA) Tenaga Pelopor Parlamaan Program Keuarga Harapan (FKH)	Tertutup	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penagak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Asistenai dan Rehabilitasi Sosial pada Dinasbiduk KH P3A 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS /RISIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERLEMBANGAN	UNIT PENJAJAH
1	460	5 Masyarakat miskin : Raskin, BLT dll Masyarakat Miskin Perseoran Masyarakat Miskin Perkotaan Pengelompokan Data Kemiskinan Sumbangan Sosial	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk jenkutu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang menguntungkan Linearja Perangkat Daerah	7 1 Bidang Perencanaan Sosial pada Dinas/dituk KB P3A 2. Bidang Kesjahteraan Rakyat
	463	Korban Bencana Jaminan Sosial Pecarian dana untuk sumbangan penyelenggaraan rumah, kotaragasas, hazar deb Panti Asuhan Bimbingan Sosial Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya PVK Mekam Umum Paljawan Khasus, Keluarga, Raja Krematorium	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas/dituk KB P3A 2. Bidang Kesjahteraan Rakyat
	46C	Kualitas Hidup Perempuan Perindugan Perempuan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kejahatan Lainnya (Trafficking, tipudis, dll) Keselamatan Anak Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) Perlindungan Anak Kesjahteraan Anak dan Keluarga	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perindugan Anak pada Dinas/dituk KB P3A 2. Bidang Kesjahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
1	460	3 Kekerasan pada Perempuan dan Anak Peperan Penanganan Korban	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penagak hukum	6 Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Pembertayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas/daerah KB P3A 2. Bagian Kesjahteraan Rakyat
	470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan Pendafaran Perilaku Identitas Penduduk Biadata Nomor induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris dan Bidang-Bidang pada Dnduk Capil 2. Daaiar. Pemerintahan
	471	TRANSMIGRASI Penyiapan informasi daerah transmigrasi Informasi potensi peluang belajar dan bekerja di daerah transmigrasi Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi Permasalahatan/sosialisasi transmigrasi Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi Publikasi transmigrasi melalui peneran dan kesenian Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi Kegiatan di bidang transmigrasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kementerian Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DAFTAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOLAH
1	2	5 Keputusan transmigrasi karena daerah terjad: kodifikasi Permukiman transmigrasi Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi Pengembangan struktur wilayah dan analisis foto wilayah transmigrasi Data ruang sarana kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi Teknis ruang suatu pemukiman dan lokasi/ peta informasi pemukiman Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigrasi, fasilitas umum (solin dan jaringan transportasi Taraf pemukiman, pengadaan area tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas area tanah Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi Tata ruang pemukiman transmigrasi Rancangan dan pemanfaatan awal tanah 470 Pengajian dan pengembangan metode pengeralih dan pencampatan Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengeralih dan pencampatan Pergerakan Pendafaran dan seleksi calon transmigran Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran Transmigrasi yang dinyatakan lulus penyalangan	4	5	6	7
						Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS AKSES	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENJUALAH
1	2 470	3 Rancangan meliputi USM Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sepektela tanah Inventarisasi penanaman kembali dan penggunaan areal tanah Pengukuran basis aset pemukiman Penyelesaian perubahan areal dari urusan perijinan pemanfaatan areal tanah Sarana pemukiman transmigrasi Pembinaan dan pengendalian penyediaan sarana air bersih Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan petersi lahan dari lingkungan Pengerahan, pemindahan dan penempatan	4 Bisa / Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang menyukai tak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Keuangan Pusat
	470	Pemberangkatan transmigran Peningkatan transmigran melalui laut, udara, dan darat Jadwal dan syarat pelaksanaan pemberangkatan Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan Pengerahan perjalanan transmigran Pengerahan rute pemberangkatan Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan Penerapan Transmigrasi Kestabilan lokasi dan daya tampung Pendataan transmigran di lokasi yang masih dilina Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap	Bisa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang menyukai tak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Keuangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	LINK PENGCIH
1	2	3 I.P.T Penerapan penempatan transmigrasi penggarib Penerapan transmigrasi (transisi), pelatihan transmigran dan program/ media pengajaran Penyusunan silabus dan modul pelatihan Penyusunan calon peserta/pelatih Penerapan transmigrasi di transitio Pelayanan kesehatan bagi transmigran Pelayanan makanan bagi transmigran Pelayanan pembekalan/ peralatan bagi transmigran Pembinaan masyarakat transmigrasi Identifikasi dan peajar pembinaan Identifikasi analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyusunan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaa Pembinaan Pendidikan, Penyediaan/penyipan sarana dan usaha pengembangan pendidikan Pelaksanaan penyipan tenaga pendidikan dan status, Pelaksanaan Pelaksanaan partisipasi masyarakat Pembinaan Kesehatan Penyediaan sarana kesehatan dan KH Pengulangan penyakit dan kejadian luar biasa Pendidikan/ kesehatan dan pangan Pembinaan rumah	4	5	6	7

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOM
1	470	3 Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama Bimbingan adaptasi masyarakat Bimbingan pelaksanaan pembangunan inisiasi sosial Pelayanan pos di daerah transmigrasi Pencurahan LPT yang layak untuk di serahkan Penilaian transmigrasi teledan Pernyataan atau penilaian kelangkaan teleda	4 Biasa / Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Kewenangan Pusat
	470	KEJAJARAN BERENCANA Alat Kumpul arsip Pelayanan KB meliputi KB Lesari, KB Mandiri Pelayanan KB (PLKB) Pos KB dan Akseptor KB	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang KB dan Keluarga pada Dinasdaduk KB P3A 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	480	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Ketijaksanaan dan Program Pemerintah dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	Terbatas	Diuasai hanya untuk penunjang keijaksanaan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Kominfo
	480	MEJAL MASA Surat Kabar, Majalah, Bulletin, Jurnal Press Release, Klafikasi Berita, Press Statistik Perindustrian Perdagangan termasuk 9 barang pokok Perkembangan dan Perbankan Bidang lainnya Layanan Informasi/Leaflet Masukan Analisis Gubernur Televisi Film Dokumenter Kewartawanan/Jurnalistik Pembentukan Organisasi Profesi	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Informasi Publik pada Dinas Kominfo 2. Bagian Humas dan Protokol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DAFTAR PERHITUNGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kasus-kasus kewartawan Penyelenggaraan Profesi Bantuan keadilan/dari organisasi Profesi Wartawan Wartawan Masyarakat Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan Temu Pers/Konferensi Pers, Pers Tour Kunjungan Wartawan Asing Penyelatan Masyarakat, Publikasi Lembaga Komunikasi Masyarakat, Lembaga Perumahan Pertamina, Bakohumas dan Kehumasan Training Fhotografi, Training Berita Jurnalistik Binik Infokom Raxonda Infokom Media Cetak meliputi perijinan hingga penerbitan jrn bila terjadi pelanggaran Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan jrn bila terjadi pelanggaran Radio Pergawasan Lembaga Penyiaran Kelembok Perantara Isi Siaran Pergawasan Isi Siaran SDM Penyiaran Peredaran Ketertuan Pemasangan Reklame Pemasaran				
	480		Liasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki data yang mengorganisir Perangko Daerah	Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERUMBUHAN	UNIT PENGOLAH
1	480 2	3 Petiduan Information Center Perbaikan Bidang Infokom Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah Wahana Komunikasi Masyarakat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Promosi Luar Negeri Kunjungan Wartawar Asing Fasilitas Peningkatan Pelayanan Informasi Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gerakan Himpunan Naskah Sabukan, Himpunan Paparan, Himpunan Seyone Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Blog Interaktif Dialog Interaktif, Rubrik Materi/Polines Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif Pembuatan Kolom Khusus Hasil Pembahasan Bantuan kepeduli organisasi Profesi Wartawan Masyarakat Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan Temu Pers/Konferensi Pers	4 Biasa Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	E Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Kominfo dan Publikasi dan Bidang Informatika pada Dinas Kominfo 2. Bagian Humas dan Protokol
	489	Penyuluhan Masyarakat Publikasi Training Photografi Training Berita Jurnalistik Binak Infokom Rakor dan Infokom Lembaga Komunikasi Masyarakat Pertemuan Dakwah dan Ketahanan	Biasa Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kominfo dan Publikasi dan Bidang Informatika pada Dinas Kominfo 2. Bagian Humas dan Protokol

NO	KUJUH KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	LIKAK AKSES	DASAR PERUMBUHAN	UNIT PENGGALAH
480	2	3 Rako: Pengendalian Kegiatan	4 Biasa/Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Komunikasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi 2. Bagian Humas dan Protokol
480		Pengelolaan website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Hias/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi
500		PERFEKSIAN Dewan Komisaris Pengaturan Pangan Pengaturan Sediaan Perizinan pada umumnya, Untuk partiznar sesuai Bidang, klasifikasi pada masalahnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretaris dan Bidang-Eidang pada Disperindag 2. Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas PMPTSP 3. Bagian Perencanaan
500		Perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya	Tertutup	Dikuasi hanya untuk petinggi, kebijakan, pengawasan serta perangkat hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas PMPTSP
510		PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perdagangan pada Disperindag 2. Bagian Perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNTUK PENGOLAH
1	510	3	4	5	6	7
	510	<p>Promosi perdagangan</p> <p>Belanja raya</p> <p>Pameran</p> <p>Pelelangan, distribusi</p> <p>Pemasaran Serbeka</p> <p>Perentian harga pokok</p> <p>Bina usaha dan sarana perdagangan</p> <p>Rekreasi dan program kerja</p> <p>Beras, Garam</p> <p>Minyak Tanah, Minyak Goreng, Sabun dll</p> <p>Pemasaran</p> <p>Pertokoan, Kak. Lina, Kios, Pusat Perbelanjaan</p> <p>Pasar</p> <p>Ekspor</p> <p>Ijin ekspor</p> <p>Perdagangan bar. negeri</p> <p>Manajemen perdagangan internasional</p> <p>Pembelian ekspor barang</p>	<p>Tertbatas</p>	<p>Dibatas hanya untuk penerbit kebijakan, pengawasan serta penegak hukum.</p>	<p>Mamili dampak yang mengganggu kinerja Peringkat Daerah</p>	<p>1. Bidang Perancangan pada Disperindag</p> <p>2. Bagian Perencanaan</p>
	510	<p>Perijinan (HD, Gangua, Reklame, dll)</p> <p>Penebitan SIUP</p> <p>Perpajakan</p> <p>Ijin prinsip</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Perdagangan antar Pulau</p> <p>Kerjasama bahan baku</p> <p>Lulusi pemasaran</p> <p>Kontrak</p> <p>Tera dan Tera Ulang, Biaya tera. Cap tanda tera</p> <p>Takaran, Timbangan dan ukur timbangan</p>	<p>Biasa/Tertuka</p>	<p>Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Peringkat Daerah</p>	<p>1. Bidang Pasar pada Disperindag</p> <p>2. Bagian Perencanaan</p>
	510		<p>Dialihkan ke Kabupaten/Kota</p>			<p>1. Bidang Pelayanan</p> <p>Perizinan pada Dinas PMTTSP</p> <p>2. Bagian Perencanaan</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS APLIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	510	3 Kaitrasi	4 Biasa / Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perdagangan pada Disperindag 2. Bagian Perencanaan
	510	Perdagangan antar pulau Aneka Usaha Perdagangan	Bisa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perdagangan pada Disperindag 2. Bagian Perencanaan
	510	Import Ijin Import Pemberian Ijin Pengendalian Ijin Standar, Mula Dagang Import, Rumah Tangga Manajemen Perdagangan Internasional Kegiatan Import Pembinaan Import Pengendalian Import Pemanfaatan Import Faktor-faktor Pendukung Pergawasan Mutu Barang Import Pelayanan Kegiatan Import Bahan Konsumsi Bahan Baku Bahan Penolong Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import Utaha Negara (Perum, Personel) Perusahaan Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk peneru kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Untuk ijin impor dialihkan ke DPMPTSP 1. Bidang Perdagangan pada Disperindag 2. Bagian Perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KT ASISTIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PER. INBANGAN	LOKASI PENGOLAH
1	510	3 Kejasama Bahan Baku Industri Pemasaran Kontrak Pengaruh Potensi Perdagangan Luar Negeri Promosi dan Informasi Kejasama Pengadangan, termasuk tangki penyimpanan Peti Kemas Tangki Penyimpanan	4 Basa / Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Industri pada Disperindag 2. Bagian Perencanaan
	510	KOPERASI Bina Usaha Koperasi Koperasi Perbaikan	Riase / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM 2. Bagian Perencanaan
	510	Koperasi Nini Pentadua	Tertatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan. Pengawasan serta penegakan hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM 2. Bagian Perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERJUMBUANGAN	UNIT PANGHIMPUNAN
1	510	3 Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha kecil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Permodalan Koperasi Pembentukan Modal Pemanfaatan Modal Perbankan dan Asuransi Permodalan Luar Koperasi Kredit Program Umum Kredit Program Khusus Distribusi dan Jasa Koperasi	4 Basa / Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM 2. Bagian Perencanaan
	510	Distribusi Bahan Pakuk Distribusi Aneka Bahan Distribusi Kerjasama Niaga Jasa Argkinan Jasa Perumahan Aneka Jasa Koperasi Kelistrikan, Internet dan Telekomunikasi Bina Lembaga Koperasi	Basa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM 2. Bagian Perencanaan
	510	Organisasi Koperasi Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi Pemberian Bacan Hukum Koperasi Penyelesaian Perbantuan Koperasi Kewenangan Koperasi Pejabat Koperasi Setolah Aneka Gasas Lert b Organisasi Koperasi Penyelesaian Penyalahgunaan/Perselisihan Bimbingan Kesadaran Hukum Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penerbitan kebijakan pengawasan serta penggerak link an	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM 2. Bagian Perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERUMBANGAN	UNIT PENGIKHAH
1	510 2	3 Rapat Anggota Tahunan Koperasi: Pengurus dan Badan Pemeriksa Dewan Koperasi Indonesia (LEKOPIN) Badan Perasahat dan Perimbangan Koperasi. Unit Desa (BPP KUD)	4 Bebas/Terbuka	5 Pengguna dari eksternal dan internal yang menpunyai hak akses	6 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perekonomian
	510	Bina Duta Laksana Koperasi Klasifikasi Koperasi Pedesaar Klasifikasi Koperasi Perkotaan Klasifikasi Koperasi Sekunder Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi Administrasi Koperasi Pedesaan Administrasi Koperasi Perkotaan Karyawan/Marngat Koperasi Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Penyaluran Alat Sekolah Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD Akutansi Akutansi Koperasi Perkotaan/Perkotaan Akutansi Koperasi Sekunder	Terbatas	Diberasi hanya untuk menemu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perekonomian
	510	Pergawasan Koperasi Pergawasan Koperasi Primer Pergawasan Koperasi Sekunder Koperasi Jasa Aneka Pergawasan Usaha Pergawasan Usaha Mikro Pergawasan Usaha Kecil Pergawasan Usaha Menengah	Terbatas	Dibatas hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKAS. KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
1	2	3	4	5	6	7
510	<p>Kerjasama Kantor Akuntan Peyuluhan Koperasi Pembinaan Kuder Koperasi Mesyarakat Umum Forum Komunikasi Kelompok Tani Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL) Penitip: Tingkat Nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perencanaan Usaha Pembinaan Usaha Mikro Pembinaan Usaha Kecil Pembinaan Usaha Menengah</p> <p>PERTANIAN Tatausaha Pangan Rencana dan Program Bimas/Inmas (termasuk Kredit) Pelaporan dan Evaluasi Pertanian Produksi Padi Palawija Panen Gagal (Paso)</p> <p>Horlita Jura (sayuran, buah-buahan, tanaman lain)</p>	<p>Basa / Terbuka</p> <p>Pengguna dan eks-eruit dan formal yang mempunyai hak akses</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM 2. Bagian Perencanaan</p>		
520	<p>PERTANIAN Tatausaha Pangan Rencana dan Program Bimas/Inmas (termasuk Kredit) Pelaporan dan Evaluasi Pertanian Produksi Padi Palawija Panen Gagal (Paso)</p> <p>Horlita Jura (sayuran, buah-buahan, tanaman lain)</p>	<p>Terbatas</p> <p>Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Sekretariat, Bidang-Bidang pada Dinas Perikanan dan Kelautan 2. Bidang Perencanaan</p>		
520	<p>Horlita Jura (sayuran, buah-buahan, tanaman lain)</p>	<p>Terbatas</p> <p>Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Bidang Perencanaan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian</p>		
530	<p>Sarana Usaha Pertanian Perikanan Meliputi traktor dan sebagainya Perabotan dan pembibitan Pupuk</p>	<p>Terbatas</p> <p>Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Kegiatan Perencanaan</p>		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	520	3 Irigasi Pertanian Rehabilitasi Lahan Pertanian Tanah Pertanian Pangan Peralihan Perdagangan Kebun Pengasahan, Petani Lahan kritis Perindungan Tanaman Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Penyakit Tanaman Pangan Hama tanaman pangan Pemerantasan Pestisida Agensi Pengendalian Haya Pengembangan Sumber Daya Pertanian	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian
	520		Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Hidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian 2. Bagian Prekonomian
	520		Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Didang Tanaman Pangan Dinas Pertanian 2. Bagian Perkebunan
	520	Pemasaran dan Promosi Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Dan Perkebunan 2. Bagian Prekonomian
	520	KEHUTANAN Perencanaan Hutan Survey Survey PPA Survey Areal Survey Pembinaan Hutan Survey Potensi Hutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIF	KLASIFIKASI KEMAMPUAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	520	3 Tata Ruang Kawasan	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasannya serta penegak hukum	5 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Kewenangan Pusat
	520	PLURIKAN/AN Perumusan Kebijakan, Rencana, Program, Statistik, Prospek, Evaluasi dan Pelaporan bidang Perikanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasannya serta penegak hukum	Memilik dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada DKKP
	520	Penyuluhan Pengembangan dan Pemberdayaan Penyuluh Peningkatan GFM Penyuluh Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayan Usaha Perikanan Peningkatan Ikan Sertifikasi hasil tangkapan ikan dan cara penangkapan ikan	Bebas / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai basic akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perikanan pada DKPP
	520	Pengendalian Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan Usaha perikanan tangkap Teknologi Perikanan Produksi Perikanan Standarisasi Mutu Hasil Perikanan	Bebas / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perikanan pada DKPP

NO	KODE KLASIFIKAS.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERUMAHANCIAN	UNIT PENGOLAH
1	520 2	3 Perjanjian Kejasama Nelayan Andon dengan Profesi I.N.T. Pergedalian Sumber Daya Ikan, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas, Mediasi, Penyelesaian Konflik antar nelayan Peraturan Tindak Pidana Sumber Daya Perikanan Kopertai Perikanan Pemberian Rekomendasi, Ijin Lokasi dan Penunfakal kawasan perikanan ikan.	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penerbitan kebijaksanaan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 Bidang Perikanan pada DKPP
	521	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC Sertifikasi Kesehatan Ikan Usaha Perikanan Pelatihan Nelayan Pernikahan waria nelayan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penerbitan kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perikanan pada DKPP
	520	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Ekapo Hasil Perikanan Inspeksi Hasil Perikanan Peraturan Dalam Negeri Pergusela perikanan Sarana Perikanan Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan, Pembentukan Pembesaran Fasilitas Serjimen : STIP, SIPI, SKP Perbenihan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Pernodaan dan Investasi Kelompok Pembudidaya Ikan Pengendalian hama dan penyakit Penyakit ikan Hama ikan Laboratorium Kesehatan Ikan Obat-obatan ternasuk sertifikasinya	Biasa / Terbuka	Penggunaan cara eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Hidang Perikanan pada DKPP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNTUK PENCOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Angkutan Kemumpang Angkutan Horong		pengawasan serta penegak hukum		2. Bagian Perkonomian
	550	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Ker) Keceklaan Lalu Lintas Uji Mutu Keselamatan, Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan Raya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk peneliti kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Lalu Lintas dan Bidang Perhubungan 2. Bagian Perkonomian
	550	Lalu Lintas Sungai Perizinan Sungai Perkapal Air Angkutan Angkutan Sungai Keselamatan, Rambu-rambu Trayek Saraka/angkutan penyeberangan Keceklaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk peneliti kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Lalu Lintas dan Bidang Angkutan pada Bidang Perhubungan 2. Bagian Perkonomian
	550	Perhubungan Sungai Lalu Lintas Angkutan Sungai Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu Pelayaran Khusus Akar Layar Terminal Penumpang, kontainer Terminal Keberangkatan Penumpang Terminal Kepulangan Penumpang Pelabuhan Khusus/Desnaga Khusus Pergerakan/Perawatan Patroli Perairan Keceklaan, Gangguan Keceklaan Penumpang/Kapal Keceklaan Baring		Dibatasi hanya untuk peneliti kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Lalu Lintas dan Bidang Angkutan pada Bidang Perhubungan 2. Bagian Perkonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ALIR	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	350	<p>Gangguan Sarana/Pelayanan Perbaikan/Penyelenggaraan Perencanaan Perfijiran Berkayuh/ijin Pembangunan/ijin Usaha Perkereta api Semua meliputi Lokomotif, Gerbang, Bogie Prasman (Jalan/Jambatan) Angkutan Penumpang (perkereta-api) Angkutan Barang (perkereta-api) Keselamatan (perkereta-api) Kecekakan (perkereta-api) Perawatan/Perbaikan Perizinan</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pegawai serta penyangkutan	Memiliki dampak yang merugikan kinerja Petanagkat Udara	Kewenangan Pusat
	550	<p>Perhubungan Udara Lalu Lintas Angkutan Udara Penerbangan Domestik Penerbangan Luar Negeri Penerbangan Haji Penerbangan Charter/Non Regular Penerbangan Khusus/Jembatan Udara Pelabuhan/Handar Udara Tanah/Lokasi Bandara Landasan Apron Terminal Penumpang Terminal Cargo Pelayanan Parkir Kendaraan Alat Angkutan Udara Pesawat Udara Dermaga Muatan Dalam Negeri Muatan Luar Negeri</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pegawai serta penyangkutan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Petanagkat Udara	<ol style="list-style-type: none"> Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Bagian Perencanaan
	550					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBLANGAN	TUNTI PENGOLAH
1	2		4	5	6	7
550	Benda Pos, Perangko Sampul Peringatan Jasa Pos Cetak, Teknik Perjanjian Rekomendasi Usaha Jasa Pos/Titipar Peribukitan Ageru/Cakung Gangguan Sarana dan Prasarana Kecelakaan Sabotase Penyalahgunaan Teknologi Informasi Kejahatan Peralatan Telepon		Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang merugikan kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informatika pada Dinas Kominfo
550	Intercom/USO Telegram, Telex/SBB, Family Satelit, Stasiun Bumi Radio komunikasi		Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informatika pada Dinas Kominfo
550	Sistem Pembinaan/Penertiban Perijinan		Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informatika pada Dinas Kominfo
550	Parwisata dan Rekreasi Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pariwisata Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata Restoran dan Rumah Makan Zona Usaha Obyek dan Atraksi Wisata Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Usaha Sarana Pariwisata		Bisa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pariwisata pada Dinas Keperluan Olahraga dan Pariwisata 2. Bidang Perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KTAWANAN	JAR AKSES	DAJAR FERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	550	<p>Meteorologi dan Hidrologi Data Debit Ardatan Curah Hujan Klimatologi Hujan Buatan Persempangan Binang</p> <p>TENAGA KERJA Data Permintaan TK/TKW Dari Luar Negeri Data Penyediaan TK/TKW Dari Daerah Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PPTKI ReLanjutan Calon TKI/TKW Seleksi Naker Ke Luar Negeri Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW Berkas Pnsyarat dan Calon TKI/TKW Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW Pendaftaran Naker TKI/TKW Pembuatan Rekomendasi Paspor/Umrah Tangga Penjajitan Kerja TKI/TKW Kulturak Tanggah Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KUTKI) Permohonan Faskal Ke Luar Negeri Pelatihan TKI/TKW</p>	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	2. Bagjar Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Kespelitbangda
	560		Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelatihan dan Peningkatan Naker pada Dinas Tenaga Kerja
	550	<p>Perubahan Naker Pembekalan Ke Luar Negeri Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri Berita Acara Serah Terima TKI/TKW</p>	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelatihan dan Peningkatan Naker pada Dinas Tenaga Kerja

NO	CODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
1	560	3 Perubahan Naker Kepulauan TKI/TKW Karena Ketidakhayalabis Perubahan TKI/TKW Illegal TKI/TKW Terkena Kasus Pidana Terdidik (TKMT) Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP) Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Lembaga Penyelat Naker Ijin Pendidikan Lembaga Penyaluran Naker Asing Kerja Lokal/Daerah dan Asing Kerja Negara (AKAN) Data Evaluasi Kinerja Penyelat Jasa Tenaga Kerja (PTTKI/BKS/BKE) Pencadangan Ijin Penyelat Jasa Tenaga Kerja (PJTEL, BKK, BES)	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk pencatu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah	7 Bidang Pelatihan dan Penempatan Naker pada Dinas Tenaga Kerja
	560	Tenaga Kerja Orang Asing Rekomendasi Perparijnaan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing Data Tenaga Kerja Asing Kecekakan/Kematian Tenaga Kerja Asing Pelebaran Tenaga Kerja Asing Pelebaran dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing Illegal	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penerbit kebijakan, pencadangan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah	Didang Pelatihan dan Penempatan Naker pada Dinas Tenaga Kerja

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARST	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOLA
1	570	3 PENANAMAN MODAL Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Modal Patungan (joint venture/penyerahan modal) Pasar Uang dan Modal Saham	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	7 Bidang Penanaman Modal pada DPTSMFT
	580	FERBAKKAN MONETER Kredit Asuransi, Dana Keluaran Lalu Lintas Polis Premi Pertanggung/Pemegang Polis Uang Pertanggung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan pada Bagian Kredit Bank Jateng
	580	Investasi Tabungan Deposito Tabanas Taska Tapelpran Bank Pembangunan Daerah Bank Jateng Alat Pembayaran meliputi check, giro wesei, transfer	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan pada Bagian Pelayanan Bank Jateng
	590	AGRIKULTUR Pata Gura Tanah Pengurusan Hak-Hak Tanah Guna Usaha Hak Guna Bangunan				Kewenangan Pusat

NO	KODIF KLASIFIKASI	JEMIS ARB.P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERUMBAANGAN	UNIT PENGOLOLAH
1	2	2	4	3	6	7
590		<p>Perencanaan dan Pengukuran Perpetuan</p> <p>Penyediaan Dulu, Peta dan Publikasi Fakta Inta Guna Tanah</p> <p>Tanah Zoniric Landreform</p> <p>Redistribusi</p> <p>Pendalaman Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian</p> <p>Pencatatan Tanah Objek Landreform</p> <p>Pembayaran Tanah Landreform</p> <p>Sengketa Redistribusi Tanah Objek Landreform</p> <p>Ganti Rugi</p> <p>Ganti Rugi Tanah Kelebihan</p> <p>Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan</p> <p>Ganti Rugi Tanah Absentee</p> <p>Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee</p> <p>Ganti Rugi Tanah Perikelir</p> <p>Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir</p> <p>Bagi hasil</p> <p>Penetapan Irribangar Gadaai Tanah</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Bag. Hasil</p> <p>Sengketa Perjanjian Bagi Hasil</p> <p>Gadaai Tanah</p> <p>Pendaftaran Pelaksanaan Gadaai Tanah</p> <p>Pelaksanaan Gadaai Tanah</p> <p>Sengketa Gadaai Tanah</p> <p>Bimbingan dan Penyuluhan</p> <p>Pengembangan</p> <p>Yeyasan Dar a landreform (YDL)</p> <p>Pengurusan Hak-hak Tanah</p> <p>Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis</p> <p>Sewa Tanah</p> <p>Sewa Tanah untuk Taraman teKamah Taraggenta :</p>				Kewenangan Pusat
590						Kewenangan Pusat
590						Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Tebu, Tombakau, Rosela, Cerehoras</p> <p>Hak Milik</p> <p>Pecorangan</p> <p>Racan Hukum</p> <p>Hak Paksi</p> <p>Peraturan</p> <p>Warga Negara Indonesia</p> <p>Warga Negara Asing</p> <p>Badan Hukum</p> <p>Badan Hukum Indonesia</p> <p>Dadan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor</p> <p>Dagang Asing</p> <p>Tanah Gedung-Gedung Negeri</p> <p>Cara Usaha</p> <p>Perkebunan Besar</p> <p>Perdagangan Rakyat</p> <p>Pendaftaran</p> <p>Perikatan</p> <p>Kebudayaan</p> <p>Hak Guna Bangunan</p> <p>Perorangan</p> <p>Badan Hukum</p> <p>P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)</p> <p>Badan Hukum Asing He ande-FBE No. 5/56</p> <p>Pemulihan Hak (Per Pres 4/1960)</p> <p>Hak Pergerakan</p>				
	590					Kecamatan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEPAWANGINAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 590	3 PN Ferrimus, Bonded Ware House, Industrial Estate; Real Estate Perusahaan daerah Pembinaan Perumahan Sengketa Tanah Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183) Pencabutan dan Pembebasan Tanah Pencabutan Ilak Pembebasan Tanah Ganti Rugi Tanah Pendaftaran Tanah Pengukuran/Pemetaan	4	5	6	7 Kewenangan Pusat
	590	Keuangan Turisris Triangulasi Peralatar Lana Pengukuran (Permen Agraria No. 6/1960) Sertifika Penjabat Pembelian Akte Tanah Inventarisasi Tata Guna Tanah LanJelcom Pengurusan Hak-hak Tanah Pendaftaran Tanah				Kewenangan Pusat
	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAAN Perumusan Kebijakan Bidang Kep. an, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pemertama Kebijakan Evaluasi Laporan	Terbaca	D. batasi hanya untuk pemenuh kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas PU, PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS RISIKO	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGO LAH
1	2 600	3 Araclictar Bahan bangunan Tanah dan batu Aspal Besi dan logam lainnya Besi beton Besi Profil (konstruksi) Paku	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Cipta Karya dan Bina Marga Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Penanganan
	500	Aluminium profil Bahan-bahan perlengkapan dan pengawat (cat, tech cil, pengawat kayu) Seramen Terdapat serangga Terdapat radasi atom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Cipta Karya dan Bina Marga Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Penanganan
	600	Kayu Bahan paku, up, Abap Alat-alat penggarut dan pengunci Bahan-bahan bangunan lainnya Instalasi listrik Instalasi bangunan Instalasi listrik Instalasi sanitasi Instalasi pengatur udara Instalasi akustik Instalasi cahaya/penerangan Konstruksi pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran Terhadap gempa Terhadap angin/udara/panas Terhadap kegadahan, Terhadap gas/explosive	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penataan Ruang dan Bidang Bina Program pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Penanganan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	610	3 PENCALIRAN Trigasi Bancungan Waduk Bendungan Tanggul Menara pengambilan pembangiran dermaga Bangunan pengambilen	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Cipta Karya dan Bina Marga Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan
	610	Bendungan Bendungan dengan pintu bilas Bendungan dengan pompa Pelimpahan banjir Inventarisasi data pantai Laporan Kejadian Banjir Pengambilan bebas Penggantilan bebas dengan pompa Suatur dengan pompa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Sumber daya air pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan
	610	Kandang lumpur Silfektor Escoope etanel Bangunan pembuaya Saluran Saluran tidak Saluran sekunder Suplesi Fersier Saluran kwarter Saluran pucangan Saluran terutup / erowangan Bangunan Bangunan bagi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Sumber daya air pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	610 2	3 Bangunan dan serbaguna Bangunan sadap Bangunan check Bangunan teriun Bax 12345 Got miring Talang Syphon Gorong-gorong Pelintasan samping Bangunan Pembuangan Saluran Saluran Pembuangan Induk Saluran Pembuangan sekunder Saluran Pembuangan tersier Bangunan Bangunan col let Bangunan terjun Dangunan perahun tanjir Gorong-gorong pembuangan Talang pembuangan Syphon pembuangan Bangunan lainnya Jalan Jalan Inspeksi Jalan Logistik Jembatan Jembatan inspeksi Jembatan Uluwan Tangga aksi Kubangan kerbau Waduk lapangan Bangunan pemajang Jembatan telepon	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penerbit kebijakan, pengawasan serta penyak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Sumber daya air pada Dinas FUPR 2. Bidang Administrasi Pembangunan
510			Terbatas	Dibatasi hanya untuk penerbit kebijakan, pengawasan serta penyak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Sumber daya air dan Bidang Bina Marga pada Dinas FUPR 2. Bidang Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS AKSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	610 2	<p style="text-align: center;">3</p> Stasiun Arzo Bangunan TPI dan pasarkoran Polder Tanggul selidling Tanggul Bangunan penutup sungai Jembatan Bangunan pembawa Saluran muka Saluran pembawa induk Saluran pembawa sekunder Saluran stasiun pompa pemasukan Dangkalan baki : Corong-purong Syphon Bangunan pembuangan Stasiun pompa pembuangan Pintu Air: Perbusangan Gorong-gorong penulangan Syphon pembuangan Hangunan Pengukur Air Bangunan Pengukur Cuali Hujan Bangunan Gudang Stasiun Pompa Bangunan Listrik Stasiun Pompa Rumah Petugas Eksploitasi Pasang surut Salurak Pembawa Tertier Salurak Penyirapanan Air Salurak Pintu Pembuangan Bangunan pembuangan Salurak Pintu Pembuangan Bangunan lainnya	4 Tertbatas	5 Dibatasi hanya untuk pemenuhan kebijakan. Pengawasan serta penegak hukum.	6 Memiliki dampak yang menggarug kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Sumber daya air dan Bidang Bina Marga pada Dinas PU UIR 2. Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMEANGAN	UNIT PENGOLAH
1	610 2	3 Kolori pasang Seluran Saluran Lelu Lintas Saluran Muko Bangunan Bangunan Penangkal Kotoran Bangunan Pengukur Muka air Pengendalian sungai Bangunan pengaman Tanggul besi Pintu Pengatur Banjir Klep pengatur Banjir Tembok pengaman Tebat Krib Kantung Lumpur Check Dam Syphon Saluran pengaman Saluran banjir Saluran Drainage Corepare Bangunan lainnya Warning System Stasiun, Stasiun Pempa Stasiun pengukur Curah Hujan Stasiun Pengukur Air Stasiun Pengukur Ceca Stasiun Fos Penjagaan Pengaman Pantai Tanggul Krib Bangunan lainnya Air Perirukan (Lama, Waduk, Sungai)	4 terbatas	5 Dibatasi hanya untuk pemenuh kebutuhan, pengawasan serta pemngk katurun	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Sumber daya air dan Bidang Eina Marga pada Linaa PL PR 2. Bidang Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KELAMINAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	620 2	3 JALAN Jalan Provinsi Daerah Pengantar Tumbuh	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Bina Marga pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan
	620	Ruangan Bangunan semesta Jalan Semesta Kantor proyek Gedung proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan RUMAH	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Bina Marga pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah
	620	Badan Jaan Pelajaran Tanah (earth work) Stabilitas Perkerasan Lapisan Pondasi bawah Lapisan Pondasi Lapisan Perumahan Drainase Pati Tanah Gorong-gorong (culvert) Baku Tictoir Tanah Perkerasan Pondasi Median Tarah Tamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Bina Marga dan Cipta Karya pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGLAJAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Percerisan Pasangan Daerah saungijaga Taman an Padar Bangunan Kelengkap dan Pengaman Rumahnya/anda-arda lalu lintas Larapu Percersingan Larapu Pergauran lalu lintas Patok-patok KM Patok-patok R.O.W. (Sempadan) Ket Pengamanan Pagar Turap Penahan Brunjong</p>		<p>Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum</p>	<p>Memilik dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Bidang Bina Marga dan Cipta Karya pada Dinas PU PR 2. Esakan Administrasi Pembangunan</p>
	620	<p>Jalan Provinsi Daerah perpuasaan Tatah Bangunan Jalan sementara Jembatan sementara Kantor/Gedung Proyek</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pangkat Daerah</p>	<p>1. Bidang Bina Marga Dan Cipta Karya pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan</p>
	620	<p>Bank kerja Laboratorium lapangan Rumah Badan jalan Pekerjaan tanah (earth work) Sitalisasi Perkembangan (pavement)</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pangkat Daerah</p>	<p>1. Bidang Bina Marga Dan Cipta Karya pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan</p>
	620					

NO	CODE KLASIFIKASI	JENIS ASES*	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENCAH AJAH
1	2	3	4	5	6	7
		Lapis pondasi bawah Lapis pondasi Lapis permukaan Drainase Panti Gorong-gorong (culvert) Baku rotoir Tanah Perkerasan Trotoir Tanah Perkerasan Median Tanah Tanaman Perkerasan Pasangan Desain samping Tanaman Pagar Bangunan Perlempapan dan Pengamanan Rumba-rumbu Lampu penerangan Lampu Pengatur lalu lintas Patok-patok KM Patok-patok H.U.W (serpantan) Rel pengamanan Pagar Turap pondan Bubungan Daerah pengusiran Beduk, jala				
	620				Memiliki dampak yang merugikan kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Bina Marga Dan Cipta Karya pada Dinas PUPR 2. Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIF	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERUMBANGAN	UNIT PENJUALAN
1	2 620	3 Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan) Drainase (gorong-gorong part) Median Daerah samping (pagar, tanaman) Bangunan pelengkap dan pengaman (ambuh-tambu)	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk pemenuh kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Bina Marga Dan Cipta Karya pada Dinas UUPR 2. Bidang Administrasi Pembangunan
	630	JEMBATAN Jembatan pada jalan Provinsi Daerah penggunaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Picayek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah Timbunan tanah Poncas Poncas kepala jembatan Poncas pilar Poncas angker Hanyutan bawah Kepala jembatan Pilar Pilon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk pemenuh kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Bina Marga Dan Cipta Karya pada Dinas UUPR 2. Bidang Adm Inisias Pengantar

NO	KODIF KLASIFIKASI	JENIS APSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 630	3 Lardasen Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan ortogonox Sardaran Talang air	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penerai kecijakan, pengawasan serta pepegok bukam	6 Memilik dampak yang mengargu kinerja Peningkat Daerah	7 1. Bidang Bina Marga Dan Cipta Karya pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan
	530	Bangunan penganan Tumpangtuban Dronjog Srek Dura Kist Dam Co-spule Krip Bangunan pengkap Rambu-rambu/anda-arda lalu lintas Patok per garmian Patok K.O.W. (sempadan) Opri. Badan Perkerasan Drainage Batu Median Jembatan pada jalan Provinsi Daerah pengurusan Tangg Tamanan Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penerai kebijakan, pengawasan serta pepegok bukam	Memilik dampak yang mengargu kinerja Peningkat Daerah	1. Bidang Bina Marga Dan Cipta Karya pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium Lapangan Rumah Pekerjaan tanah (carth work) Galian tanah Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Landasan Bangunan Geogar Jalan Perkerasan Jalan orang/trottoir Sandaran Talang air Bangunan pengamanan Tatap/jenahen Borjiong Sirek Daun Kist Dam Coypite Krip Bangunan pencegah Rambu-rambu/tanda-tanda lar. lintas Patok pengamanan Patok R.O.W. (sempadan) Upeti Fiadan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penerbit kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu keretia Perangkut Laerah	1. Bidang Bina Marga Dan Cipta Karya pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS AIRSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PELIMBINGAN	UNIT PENGOJAH
3	2	3	4	5	6	7
		<p>Perkerasan Drainase Bekas Mekian Jumlahkan pada jalan Nasional Daerah Penguasaan (tambah, tanaman bangunan) Bangunan semestawi (gudang proyek, kantor proyek) Pondasi Bangunan bawah Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan) Bangunan penempatan (bronjong, strek dan, krib) Bangunan pelengkap dan penganan</p> <p>BANGUNAN</p> <p>Bangunan Pemerintah Gedung Pengadilan, Rumah Prajabat Negara, Gedung DPR, Gedung Balai Kota, Pasar, Perkantoran Bangunan Pendidikan: Taman Kanak-kanak, SD & Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi Bangunan Rekreas Bangunan Olah Raga Gedung Kesenian, Gedung Perantara Bangunan Perdagangan: Pusat Perbelanjaan, Gedung Perdagangan Pertanian Bangunan Pelayanan Umum: Mandi, Cuci, kakus (MCK), Urut Gedung parkir Rumah sakit Gedung telkom Terminal Angkutan Umum/Angkutan Air/Angkutan Darat Bangunan Keagamaan, Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk pejabat kebiakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mempengaruhi kriteria Perancah Daerah	1. Bidang Cipta Karya pada Dinas PU PR 2. Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	JLAK AKSIS	ASAS PERTIMBANGAN	UNIT FINGO AH
1	2	3	4	5	6	7
	640	<p>Cara Kantor Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan Tempa Tinggal Rumah Pelemboran</p> <p>FASILITAS PENGADAAN TANAH Perumasan Perencanaan Teknis Pengordinasian Fasilitas Pengadaa Tanah Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Tanah, Penetapan Lokasi, Ganti Rugi dar. Sachunan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Asat Daerah sampai dengan sertifikatnya Penetapan (Myok/Sabyek Redistribusi Tanah), Serta ganti kerugian Tanah dan Absente Hatas Daerah Kab/Kota.</p> <p>Fasilitas adm. mistres Perumahan Penetapan tanah alayal lokasinya Unas daerah Evaluasi dan Pelaporan</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta pemegang buku	Merupakan dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman. 2. Bidang Perumahan Ruang pada Dinas PU PR 3. Bagian Layanan Pengadaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	610	3 FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAIAN Perumusan Kebijakan Teknis Penyiapan Bahan Penganggaran Menyampaikan Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitas Perumahan Ruman Inventarisasi Permasalahan Perumahan Kabupaten Kota Fasilitas Penyelesaian Sengketa tanah garapan lirtas daerah Kabupaten Penyelesaian masalah ganti kerugian cara santunan tanah untuk pembangunan Inventarisasi pemukiman tanah kosong lirtas daerah kabupaten Penyelesaian masalah tanah lirtas daerah Evaluasi dan Pelaporan	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman 2. Bidang Perumahan Ruang pada Dinas PU PR 3. Bidang Layanan Pergandaan
	640	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAIAN Perumusan kebijakan Teknis Menyampaikan bahan penganggaran Fasilitas peringatan kapasitas masyarakat Perencanaan penggunaan tanah yang komporannya lirtas daerah kabupaten Pemberian ijin lokasi Evaluasi dan Pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman 2. Bidang Layanan Pergandaan
	640	PERENCANAAN TEKNIK DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN Perencanaan Teknis Pembiayaan Perumahan Perencanaan Perumahan Pelaksanaan Perumahan Pelaksanaan data Teknis / Konstruksi Perumahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Bina Program pada Dinas PU PR 2. Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	TIAK AKSES	DASAR PERTIMELANGAN	UNIT PENGOLOLAH
1	2 640	3 PERUMAHAN UMUM Perumusan Kebijakan Teknis Penyediaan Fasilitas sarana Utilitas Jurno Rumah Korban Bencana Daerah Fasilitas Penyediaan Rumah Penyediaan Rumah Susun Khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rumah Tidak Sederhana sehat bagi Masyarakat Tertinggalan Rendah. Pelaporan di Bidang Perumahan Umum.	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang signifikan kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan 2. Bidang Hina Program pada Dinas PUPR
	640	PERUMAHAN SWADAYA Kebijakan Teknis di Bidang Perumahan Swadaya Pengkoordinasian di Bidang Perumahan Swadaya Pengembangan Perumahan Swadaya. Fasilitas dan Stimulan. Pembangunan, Pemeliharaan Rumah bagi Rumah Tangga Miskin.	4 Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang signifikan kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan 2. Bidang Administrasi Pembangunan
	640	PERENCANAAN TEKNIK KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Penyediaan Bahan Pengorganisasian Perencanaan Perumahan Teknis. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Evaluasi dan Pelaporan.	4 Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang signifikan kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan 2. Bidang Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNTUK PANGOLAH
1	640	3 PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Menyiapkan Bahan Pengordinasian. Pengajian Prasarana Sarana Utilitas. Peyusunan dan Pengembangan. Pengembangar Jejaring Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk perentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Bidang Perumukinan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Perumukinan 2. Bidang Administrasi Pembangunan
	640	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Pengordinasian. Bimbingan Teknis dan Supervisi. Pelaksanaan dan Penyusunan Inovasi. Fasilitasi Peningkatan. Pengembangan Jejaring Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk perentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perumukinan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Perumukinan 2. Bidang Administrasi Pembangunan
	640	PENGLOLAAN DATA PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN. Perumusan Kebijakan teknis Penerimaan Berita Pengordinasian. Penyusunan Data Base. Pengelolaan Data. Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi Pemanfaatan Rumah bagi Korban Bencana Alam. Fasilitasi Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Swadaya. Pembinaan dan Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk perentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perumukinan dan Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Perumukinan 2. Bidang Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOJAH
1	650 2	3 TATA RUJANG KOTA Daerah perdagangan/pelembutan Daerah Pusat Perbelanjaan Daerah Perkantoran Daerah Pemerintahan Daerah Perumahan (site & service) Kepulauan Rendah (low density) Kepulauan Tinggi (high density) Daerah Industri Industri Barat Industri Ringan Industri Rumah (home industri) Daerah Rekreasi (open space) Publik Garden Sport & playing fields Open space Transportasi (tata letak) Jaringan jalan Pencerangan jalan Jalan yang serokan api	4 Terbatas	5 Dibatasi hanya untuk pejabat sejabat, dan peryawasan serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang merugikan karena Peringkat Daerah	7 1. Bidang Penilaian Ruang pada Dinas PU dan Penilaian Ruang 2. Bidang Penilaian dan Penstar Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup 3. Bidang Infrastruktur dan pembangunan Wilayah pada Bappalitbangda 4. Kegiatan Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	LAK AKSES	PASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOAH
1	650	3	4	5	6	7
	Jaringan sungai Assamaring Saluran Pengumpulan Instansi Pengolahan Bangunan Bangunan Penyaring Bangunan Pengaliran Kotakan Bangunan Pengumpulan Bangunan Pengering Luapar Unit Disinfektan Unit Perpompaan Kesehatan Lingkungan Pansampahan Bangunan pengumpulan Bangunan pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air Buangan Industri Kegacuhan Kebersihan kota		Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasasi serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PU Penataan Ruang
	660					
	TATA LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Kebersihan Lingkungan Pencemaran Pencemaran Air Pencemaran Udara Pencemaran Tanah Pencemaran Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kerusakan lingkungan Konservasi Pesisir Dan Laut Konservasi Sumber Daya Alam		Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasasi serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3 Perluasan Hakam Lingkungan Laboratorium Lingkungan Air, Udara, Tanah Analitik Dumpak Lingkungan Pengembangan Teknologi Lingkungan Pengembangan Kapasitas Pengembangan Lingkungan	4	5	6	7
	680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM	Tertulis	Dibatasi hanya untuk pejabat kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada: 1. Dinas PU PR 2. Dinas Perumahan dan Permukiman
	700	PENGAWASAN Kebijakan dan program pengawas pengawasan perencanaan/jengalaan/proyek Pengawasan Inventarisasi Aseel Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen Pengawasan Penelitian/Riset Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informatika dan Teknologi Pengawasat Perumahan/BPN	Rahasia	Dibatasi hanya untuk pejabat kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektoriat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	710	BIDANG PEMERINTAHAN Pengawasat Pemerintahan Provinsi Pengawasat Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasat Pemerintahan Desa	Rahasia	Dibatasi hanya untuk pejabat kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Inspektoriat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	TENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
720	BIDANG POLITIK Pengawasan Partai termasuk pendaftaran partai, partai partai dll Pengawasan pemerintahan ipodkeshad Lankeu Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan keperempuanan Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME.	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing- masing Perangkat Daerah	
730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN Pengawasan Keselamatan Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing- masing Perangkat Daerah	
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengawasan Pembangunan Desa Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Pengawasan SARA (Suku Agama Ras) Pengawasan Kesejahteraan Sosial Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran Pengawasan Bartuar/Subsidi Masyarakat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing- masing Perangkat Daerah	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENYALURAN
1	750	3 BIDANG PEREKONOMIAN Pengawasan Perdagangan dan Penjualan Pengawasan Pertanian dan Perikanan Pengawasan Kehutanan Pengawasan Pertambangan/ESDM Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian Pengawasan PMDN/TKDA Pengawasan Pertambakan/Moneter Pengawasan Kelantan dan Perikanan	4 Rahasia	5 Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Inspektoral 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	760	BIDANG PEREKONOMIAN Pengawasan Pengairan Pengawasan Jalan Pengawasan Jembatan Pengawasan Bangunan Pengawasan Tata Ruang Kota Pengawasan Tata Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Air Minum PENGAWASAN PELABAT PUBLIK Penyempangan Pejabat Publik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektoral 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	770	BIDANG KEPEGAWALAN Pengawasan Fungsional PNS Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS Keanggotaan PNS dalam Parpol Penyempangan pejabat/PNS Persengketaan PNS	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektoral 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	780		Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektoral 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARIPI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOM
1	790 2	3 BIDANG KEUANGAN Pengawasan Anggaran Pengawasan Akuntansi Pengawasan Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah Pengawasan Pendapatan	4 Rahasia	5 Dibaca hanya untuk peneliti kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	5 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	7 1. Inspektori 2. Sekretariat/Bagian 1. umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah



Ditandatangani di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NCMOR